

# ANALISIS PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERBASIS NILAI PESANTREN MELALUI PROGRAM WAJIB BELAJAR DINIYAH JENJANG SMP NEGERI DI KABUPATEN SUMENEP

Khoirul Asiah

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumenep, Indonesia

E-mail: pkk.asiah@gmail.com

Ike Yuli Mestika Dewi

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumenep, Indonesia

E-mail: ikeyulimd@stkipgrisumenep.ac.id

**Abstrak:** Artikel ini hendak memperoleh gambaran secara lebih detail tentang manajemen pengelolaan program wajib belajar pendidikan diniyah di Kabupaten Sumenep untuk jenjang SMP secara obyektif, serta model-model pelaksanaan yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan menengah. Artikel ini akan mengungkapkan dengan jelas karakteristik manajemen pengelolaan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan menengah di Kabupaten Sumenep, sehingga program ini bisa berdampak terhadap pengembangan karakter keagamaan anak didik. Artikel ini merupakan riset lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun temuan artikel ini adalah berupa program wajib belajar diniyah di Kab. Sumenep. Secara khusus, program dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2016 yang kemudian diturunkan dalam bentuk juknis Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah. Sementara pada 2020, program ini diperkuat dengan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, nomor 4 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Pendidikan Diniyah. Adapun pengelolaan program wajib diniyah, baik di SMPN 1 maupun SMPN 2 Sumenep, dilaksanakan dengan mengawinkan dua opsi yang memang ditawarkan dalam Juknis, yaitu dilaksanakan secara mandiri dan non mandiri. Baik antara pihak SMPN dengan mitra memiliki peran yang berbeda dan sama-sama memperkuat keberlangsungan program ini. Pihak sekolah fokus pada fasilitas dan sarana, sementara mitra fokus pada guru dan pembelajaran.

**Kata Kunci:** Analisis, Pengelolaan, Wajib Diniyah, SMP Negeri

## Pendahuluan

Berbagai upaya untuk memperkuat karakter masyarakat terus dilakukan, terutama karakter keagamaan. Memperkuat karakter bangsa secara holistik telah menjadi fokus pemerintah, karena bangsa tanpa karakter, diyakini hanya akan menjadi bangsa yang tidak punya pondasi masa depan. Apalagi, karakter keagamaan yang pada hakikatnya menjadi dasar utama pembangunan masyarakat yang beradab dan berkeadaban. Menjadi masyarakat yang beragama, berarti menjadi masyarakat yang memiliki komitmen moralitas yang tinggi. Hanya moralitas yang kuat, yang akan memberikan dukungan terhadap eksistensi suatu bangsa, seperti Indonesia. Salah satu upaya besar tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden, Nomor 87 Tahun 2017, tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Terdapat beberapa dasar yang menjadi pertimbangan atas kelahiran PP tersebut. *Pertama*, bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi

akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti. *Kedua*, bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab, perlu penguatan pendidikan karakter.<sup>1</sup>

Dalam kerangka itu, pendidikan agama menjadi penting untuk diperhatikan dan dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam memastikan terbentuknya mental keagamaan generasi bangsa yang jelas dan terukur. Salah satu kelemahan pendidikan formal jenjang SDN, SMPN dan SMAN/SMKN adalah keterbatasan materi agama yang diberikan dalam setiap minggu. Untuk jenjang pendidikan formal semacam itu, pendidikan agama diberikan begitu sangat terbatas, berbeda dengan madrasah-madrasah yang memberikan porsi maksimal terhadap materi-materi keagamaan. Keterbatasan materi agama di sekolah formal (SDN, SMPN, SMAN/SMKN) akan berdampak terhadap lemahnya pemahaman keagamaan peserta didik, yang pada gilirannya hanya menghasilkan lulusan yang cerdas otak, tetapi lemah hati karena pemahaman keagamaan yang minim. Problem moral kemudian menjadi masalah krusial yang menjadi fenomena dalam kehidupan generasi muda ; terutama di kalangan para pelajar dengan segala bentuk demoralisasi yang terjadi.

Pendidikan menjadi sarana yang tepat untuk membentuk karakter bangsa yang beradab tersebut membawa “agama” ke dalam ruang sekolah formal menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan, agar dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan berbagai problem moral di kalangan siswa yang sudah sangat mengkhawatirkan. Sekolah formal, seperti SDN, SMPN, SMAN dan SMK yang selama ini, lebih memberikan ruang terbuka terhadap materi umum dengan mengenyampingkan materi agama, di satu sisi bisa menjadi salah satu penyebab munculnya problem moral di kalangan siswa dan generasi muda. Sebab, sekolah formal lebih menekankan pada aspek pendidikan otak, dan belum maksimal memberikan penekanan terhadap aspek hati (batin) anak didik melalui pendidikan agama yang maksimal. Pendidikan agama (diniyah) menjadi salah satu jawaban dalam menopang pengembangan nilai-nilai agama masyarakat. Untuk masyarakat Madura, madrasah diniyah telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Madrasah diniyah hampir mayoritas diselenggarakan oleh masyarakat, dari dan untuk masyarakat pula, atau dikatakan berbasis masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ike Yuli Mestika Dewi, *Karakter Toleran Pada Anak Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Berkualitas* (Banten: CV AA Rizky, 2019), 3.

<sup>2</sup> Iwan Kuswandi, “Respon Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Peraturan Bupati Tentang Wajib Madrasah Diniyah”. *Autentik: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 14, No. 1, (Januari 2020), 8. dalam <https://autentik.stkipgrisumenep.ac.id/index.phpautentik>

Dalam konteks itu, sejak tahun 2016, pemerintah Kabupaten Sumenep menerapkan program unik yang dikenal dengan pendidikan berbasis nilai-nilai pesantren. Program ini merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Sumenep di bidang pendidikan, yang dalam implementasinya dilaksanakan dalam bentuk Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah. Sejak diberlakukannya Perbup Wajib Madin ini tahun 2016, tidak ada pilihan lain bagi satuan pendidikan, khususnya di wilayah kecamatan kota Sumenep untuk melaksanakannya sebaik mungkin, walaupun dengan persiapan dan kondisi yang terpaksa, karena Kecamatan Kota menjadi tempat program ini di-*pilot project*-kan dalam tahun pertama pelaksanaan program ini. Sebagai program baru, Wajib Madin telah mendapatkan jatah anggaran yang cukup besar dari APBD Kab. Sumenep.

Sebagai kegiatan yang dimasukkan dalam Ekstra Kurikuler Wajib, maka Wajib Diniyah menjadi terobosan baru di dunia pendidikan Kabupaten Sumenep. Melalui kegiatan ini, agama telah dicoba untuk dihadirkan lebih maksimal dalam satuan pendidikan yang sebelumnya masih memiliki keterbatasan dalam memberikan pengenalan dan pemahaman terhadap anak didik. Terobosan ini tentu saja diharapkan dapat menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan pemahaman keagamaan peserta didik, yang pada gilirannya akan dapat membentuk generasi yang benar-benar memiliki karakter religius yang kuat. Terdapat beberapa masalah yang dikembangkan dalam kajian ini. *Pertama*, bagaimana dasar kebijakan program wajib diniyah ini di Kabupaten Sumenep? *Kedua*, bagaimana pola pelaksanaannya di sekolah jenjang SMP Negeri di Kabupaten Sumenep?

Artikel ini merupakan *field research* (risetlapangan), dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi. Jenis data yang dihasilkan adalah data lunak, berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari wawancara, observasi dan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengurai data-data yang didapatkan sekaligus bersifat deskriptif dimana data dideskripsikan sekaligus dianalisis dengan cara berfikir reflektif. Analisis digunakan untuk menggambarkan tentang katagori-katagori yang ditemukan dan muncul dari data.<sup>3</sup>

### **Kebijakan Program Wajib Diniyah**

Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki program unik, yang layak mendapatkan apresiasi, terutama di Madura, yaitu Program Wajib Diniyah (baca: Wadin) atau dapat juga disebut Wajib Madin. Program ini menjadi satu-satunya program di Madura, karena Kabupaten Sumenep termasuk satu dari dua Kabupaten di Jawa Timur yang melaksanakan program ini. Program yang

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 1998), 198.

sama juga dilaksanakan di Pasuruan. Program Wajib Diniyah ini merupakan terobosan positif dalam rangka mendorong anak didik, khususnya tingkat SD, SMP dan SMA untuk mendapatkan pendidikan agama yang maksimal. Bahkan, program Wajib Madin bahkan bisa menjadi alternatif dalam rangka memberikan porsi pendidikan agama yang lebih banyak kepada anak didik di bawah naungan dinas pendidikan. Dengan materi-materi umum, yang lebih dominan, tentu saja pemahaman keagamaan siswa menjadi tidak maksimal, sehingga Wajib Diniyah bisa menjadi jalan untuk mengisi kekurangan materi agama di satuan pendidikan.

Program ini diperkuat dengan Peraturan Bupati Sumenep, Nomor: 15 Tahun 2016, tentang *Wajib Belajar Pendidikan Diniyah*. Sebagaimana dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Wajib Diniyah ini, bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Sumenep ini, tanggal 18 Juli 2016, Satuan Pendidikan (SD/SDLB/Kejar Paket A, SMP/SMPLB/Kejar Paket B, SMA/SMK/SMALB/SMKLB/Kejar Paket C, di Kabupaten Sumenep WAJIB menyelenggarakan program Wajib Diniyah dengan memasukkannya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dengan Perbup tersebut, tentu saja program ini menjadi sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh semua sekolah di wilayah Kabupaten Sumenep.<sup>4</sup> Program ini dalam pelaksanaannya, bekerjasama dengan Kemenag Kab. Sumenep yang memiliki kewenangan untuk mengelola madrasah di semua tingkatan di kabupaten Sumenep, akan tetapi dinas pendidikan berperan langsung dalam sistem pengawasan perencanaan kurikulum dan juga pelaksana dari peraturan Bupati.<sup>5</sup> Hanya saja, untuk memperkuat program ini dari sisi kebijakan, pada tahun 2020, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.

Pertimbangan utama penerapan program ini, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bupati tersebut, meliputi beberapa hal. *Pertama*, bahwa pendidikan nasional di samping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia melalui pembelajaran pendidikan diniyah. *Kedua*, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Wajib Diniyah. Program ini tentu saja memiliki signifikansi yang tepat dalam memperkuat pendidikan keagamaan di kalangan siswa sekolah formal non agama. Pendidikan agama dan keagamaan, telah menjadi solusi yang penting untuk mengimbangi kemajuan zaman dengan kompleksitas persoalan di dalamnya. Dalam satu analisis

---

<sup>4</sup> Mohamad Suhaidi. Implimentasi Pendidikan Berbasis Nilai Pesantren di Sekolah Umum (Analisis Terhadap Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep dalam Membentuk Siswa Berkarakter Religius). *Jurnal Pelopor Pendidikan*, Vol. 10 Nomor. 1, September 2018, 13. [Pelopor.stkipgrisumenep.ac.id](http://pelopor.stkipgrisumenep.ac.id)

<sup>5</sup> Istighfarain. Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Program Wajib Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. *Public Corner*, vol. 12, No. 2 2017, 28. [ejournalwiraraja.com](http://ejournalwiraraja.com)

disebutkan, bahwa pendidikan agama sebagai jalan membentuk mentalitas dan karakter manusia untuk mengimbangi perkembangan modernitas.<sup>6</sup>



Gambar 1 : Suasana Pembelajaran Wajib Diniyah di SMPN 1 Sumenep

Dengan pertimbangan tersebut, program Wajib Madin telah secara resmi diterapkan menjadi bagian dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Apalagi, tujuan umum dari pelaksanaan Wajib Diniyah ini untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar.<sup>7</sup>

Intinya, program ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan warna baru dalam pengembangan pendidikan keagamaan di satuan pendidikan Kabupaten Sumenep. Hal itu relevan dengan tujuan ideal yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia lewat proses dan sistem pendidikan nasional seperti yang termaktub dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.<sup>8</sup> Program ini menjadi satu-satunya program yang ditemukan oleh Disdik dalam lima tahun terakhir. Sebelumnya, belum pernah ada terobosan kreatif dan inovatif di sektor pendidikan yang manfaatnya seperti program Wadin.<sup>9</sup> Apalagi, pendidikan diniyah merupakan bagian untuk memberikan pemahaman keagamaan yang mendalam, seperti ditulis An-Nahidl menegaskan bahwa sistem pendidikan madrasah menekankan pada pendalaman ajaran agama (*tafaqquh fid-din*) karena menjadi kebutuhan masyarakat dan mewakili kepentingan jati diri

<sup>6</sup> Fathor-Ach. Maimun, Rachman. “Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Sebagai Pusat Pengetahuan Agama Masyarakat Pedesaan (Studi Tentang Peran MDT di Desa Gapura Timur Gapura Sumenep)”, *Jurnal ‘Anil Islam*, Vol. 9, No. 1, (2016), dalam jurnal.instika.ac.id

<sup>7</sup> Perbub Wajib Diniyah, Nomor 05 Tahun 2016, Pasal 4

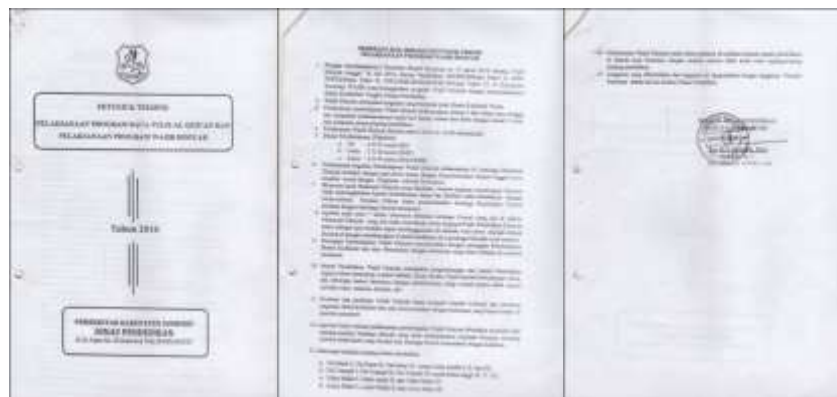
<sup>8</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

<sup>9</sup> Mohammad Suhaidi, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Wisata Religi Studi Model Belajar Langsung Ilmu Agama Ala Siswa Zaman Now* (Sumenep: CV Abidah Mahran, 2018)

sebuah lembaga pendidikan Islam. Bahkan, *mandate basic* dalam bidang ilmu-ilmu agama itu harus lebih dikukuhkan dan diupayakan sejajar dengan sekolah dari berbagai aspek kependidikannya.<sup>10</sup>

### **Pengelolaan Wajib Diniyah Jenjang SMP Negeri**

Pelaksanaan program belajar pendidikan diniyah di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Sumenep dilaksanakan dengan mengacu pada Perbup dan juknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Pengelolaan program wajib diniyah dilaksanakan dengan menggunakan beberapa skema pengelolaan yang secara teknis telah diatur dalam ketentuan yang ada. Juknis yang dirumuskan oleh dinas pendidikan sebagai turunan dari Perbup yang telah dikeluarkan oleh Bupati Sumenep pada tahun 2016. Hanya saja sejak 2020, untuk semakin memperkuat kebijakan program wajib diniyah, pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah. Sementara, juknis yang digunakan masih tetap menggunakan konsep juknis tahun 2016, yaitu :



Gambar 2 : Dokumen Juknis Wajib Diniyah Kabupaten Sumenep 2016

Secara teknis, pengelolaan pelaksanaan program wajib diniyah, dapat dilaksanakan dengan memilih beberapa opsi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. *Pertama*, kegiatan pembelajaran wajib diniyah dapat dilaksanakan di lembaga madrasah diniyah terdekat dengan asal siswa sesuai dengan desa/kelurahan tempat tinggal siswa tersebut sesuai dengan tingkatan sekolah formalnya. *Kedua*, apabila madrasah diniyah yang dijadikan sebagai tempat kegiatan pembelajaran diniyah tidak memungkinkan karena keterbatasan ruang dan fasilitas, setelah berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dapat memanfaatkan sekolah formal yang dekat dengan madrasah

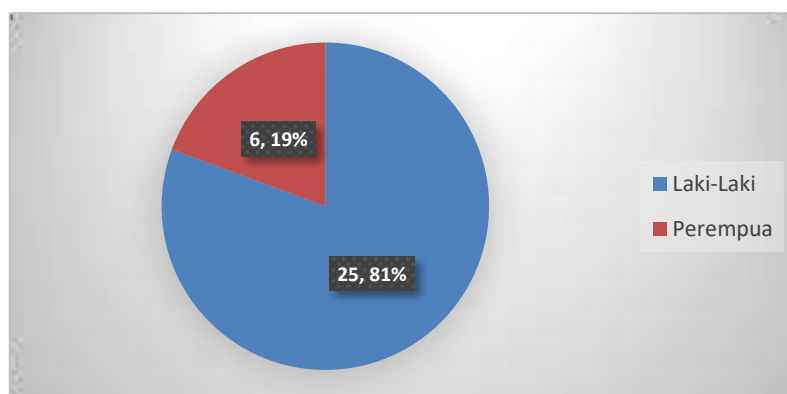
<sup>10</sup> Anis-Cecep Nikmatullah, Fauzi, "Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kota Serang", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 1, Nomor 2, (Agustus 2016), 158. dalam <https://media.neliti.com/media/publications/138907-ID-pelaksanaan-pendidikan-madrasah>

diniyah. *Ketiga*, dilaksanakan di sekolah asal siswa ; sekolah formal dengan cara mendatangkan ustadz/ustadzah. Sekolah dapat melaksanakan sendiri dengan mendatangkan guru diniyah yang memiliki kompetensi.

Pelaksanaan wajib diniyah baik di SMPN 1 maupun SMPN 2 Sumenep dilaksanakan dengan mengawinkan dua opsi secara fleksibel. Tetapi, pada dasarnya, kedua sekolah tersebut lebih menekankan pada opsi yang pertama, yaitu melaksanakan secara mandiri di sekolah. Tetapi, di satu sisi juga melaksakan opsi ketiga, yaitu siswa dapat mengikuti sekolah diniyah di luar program diniyah yang dilaksanakan di sekolah, terutama siswa-siswa yang sebelumnya telah mengikuti sekolah diniyah sebelum adanya regulasi program wajib diniyah. Hal itu misalnya ditegaskan oleh Syaifurrahman Dasuki, Kepala SMPN 1 Sumenep:

SMPN 1 Sumenep melaksanakan program wajib diniyah ini, yang efektif sejak tahun 2018, dengan menggunakan pola tipe gabungan, yang sebagian besar menggunakan tipe A. Tipe ini memberikan hak kepada sekolah untuk melaksanakannya secara mandiri wajib diniyah di sekolah. Waktunya sekitar 13.30 sampai 14.30. Sementara tipe C, juga dilaksanakan. Tipe C ini dapat dijelaskan, siswa yang sudah sekolah di madrasah diniyah yang di luar, juga tetap dilanjutkan belajar, tanpa harus ikut program wajib diniyah di SMPN 1 Sumenep.<sup>11</sup>

Sementara pelaksanaan secara mandiri dapat digambarkan bahwa semua pengelolaan program dipusatkan di sekolah, baik administrasi dan sarprasnya, kecuali dalam masalah sumberdaya guru yang menjadi domain mitra sekolah (madrasah diniyah atau pondok pesantren). Pihak mitra menjadi penyuplai SDM yang dibutuhkan disesuaikan dengan jumlah kelas yang dibutuhkan. Untuk SMPN 1 dan SMPN 2 Sumenep dengan siswa yang relatif banyak, kebutuhan guru diniyah juga banyak. Untuk jumlah guru di SMPN 1 Sumenep misalnya mencapai 31 orang guru, yang terdiri dari guru laki-laki dan perempuan.



Gambar 3: Data Guru Wajib Diniyah SMPN 1 Sumenep

<sup>11</sup> Syaifurrahman Dasuki, *Wawancara*, Sumenep, 4 Agustus 2020

Antara SMPN 1 dan SMPN 2 dalam masalah pembelajaran, guru pengajar bekerjasama dengan lembaga diniyah yang ada di sekitar sekolah, misalnya yang dilakukan oleh SMPN 2 Sumenep bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Husna Waziyaadah Madrasah Diniyah Lilbanin Walbanat Alhusna Waziyaadah. Sementara SMPN 1 Sumenep bekerjasama dengan Pondok Pesantren Mathaliul Anwar. Pola kerjasama ditekankan pada kesiapan pihak mitra untuk melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Pihak sekolah hanya berperan dalam masalah fasilitas program untuk memastikan layanan fasilitas terjamin dengan baik, sementara mitra berperan dalam proses pembelajaran sesuai dengan jadwal dan kurikulum yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan ideal dari program ini, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar.<sup>12</sup> Sebab, program wajib diniyah ini juga merupakan sarana untuk mencetak generasi yang berakhlak, sesuai dengan standar lembaga pendidikan Islam dan program wajib diniyah pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan Islam. Sementara, pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu.<sup>13</sup> Dalam satu analisis disebutkan, bahwa pendidikan agama sebagai jalan membentuk mentalitas dan karakter manusia untuk mengimbangi perkembangan modernitas.<sup>14</sup> Sementara menurut Ahmad Tafsir<sup>15</sup> tujuan utama dari pendidikan agama Islam adalah agar manusia mampu merealisasikan tujuan hidupnya; beribadah kepada Allah.

Gambaran tersebut menunjukkan tentang manajemen pengelolaan program wajib belajar diniyah di SMPN 1 dan SMPN 2 Sumenep, memiliki kesamaan dan pola yang sama. Manajemen pengelolaan semacam itu, dilakukan untuk memastikan program luhur ini berjalan maksimal di lembaga formal ini. Dengan manajemen pengelolaan yang tertata tersebut, pihak sekolah dapat bekerja secara sistematis di tengah kesibukan dengan kegiatan-kegiatan lain sekolah yang sama-sama harus dilaksanakan. Manajemen menjadi kunci keberhasilan sebuah program, apalagi bagi organisasi dan lembaga pendidikan, manajemen menjadi indikator keberhasilan roda kegiatan di dalamnya. Manajemen dalam artian sempit sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya.

---

<sup>12</sup> Perda Kabupaten Sumenep, Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.

<sup>13</sup> Zaitur Rahem, *Jejak Intelektual Pendidikan Islam* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2019), 56.

<sup>14</sup> Fathor-Ach. Maimun Rachman. "Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Sebagai Pusat Pengetahuan Agama Masyarakat Pedesaan (Studi Tentang Peran MDT di Desa Gapura Timur Gapura Sumenep)". *Jurnal 'Anil Islam* Vol. 9, No. 1, (2016). dalam jurnal.instika.ac.id

<sup>15</sup> Mohamad Suhaidi, "Implimentasi Pendidikan Berbasis Nilai Pesantren di Sekolah Umum (Analisis Terhadap Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep dalam Membentuk Siswa Berkarakter Religius)". *Jurnal Pelopor Pendidikan*, Vol. 10 Nomor. 1, (September 2018). pelopor.stkipgrisumenep.ac.id



Kompri<sup>16</sup> menyebutkan bahwa manajemen adalah proses kegiatan mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain.

Sementara untuk kesejahteraan guru-guru pengajar ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD setiap tahun anggaran. Setiap guru menerima insentif setiap bulan sebenar Rp. 150.000. Jumlah itu memang relatif kecil, tetapi pihak sekolah melakukan langkah-langkah strategis mengupayakan agar guru bisa ada tambahan insentif setiap bulan, yaitu dengan cara mendorong partisipasi masyarakat melalui komite sekolah masing-masing untuk menggalang dana yang bersifat tidak mengikat. Pihak sekolah bersama komite mencari jalan keluar untuk memikirkan masalah insentif guru agar tidak terlalu sedikit. Hal itu sama sama dilakukan oleh pihak SMPN 1 dan SMPN 2 Sumenep, sehingga pelaksanaan program ini, tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan gambaran di atas, manajemen pengelolaan program wajib diniyah jenjang SMP Negeri telah berjalan dan memenuhi standar regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah. *Pertama*, pelaksanaan program wajib belajar diniyah ini, dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2016, tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah. Dari Perbup ini kemudian dirumuskan konsep teknis pelaksanaan dalam bentuk Juknis Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Namun demikian, ada tahun 2020, program ini diperkuat dengan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, nomor 4 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Pendidikan Diniyah.

*Kedua*, pengelolaan program wajib diniyah, baik di SMPN 1 maupun SMPN 2 Sumenep, dilaksanakan dengan mengawinkan dua opsi yang memang ditawarkan dalam Juknis, yaitu dilaksanakan secara mandiri di sekolah dengan menggandeng mitra (madrrasah diniyah atau pondok pesantren) yang dekat dengan sekolah. Sementara bagi siswa yang sebelumnya telah mengikuti diniyah di luar, tetap diberi kebebasan untuk melanjutkan kegiatan diniyahnya dengan catatan tetap memberikan laporan kepada pihak sekolah. Sistem pengelolaan yang dilakukan antara pihak sekolah dengan mitra dilakukan dengan kesepakatan untuk saling melengkapi dimana pihak sekolah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan serta mengkoordinasi siswa, sementara pihak mitra berperan sebagai penyuplai guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas

---

<sup>16</sup> Kompri, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014)

dengan mengikuti kurikulum yang telah ditentukan dalam Perbup, sehingga harapan untuk menyiapkan generasi dengan pemahaman keagamaan yang kuat akan terbentuk.

## Referensi

- Dewi, Ike Yuli Mestika. *Karakter Toleran Pada Anak Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Berkualitas*. Banten : CV AA Rizky, 2019
- Fauzi, Anis-Cecep Nikmatullah. *Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kota Serang*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 1, Nomor 2, (Agustus 2016), 158. <https://media.neliti.com/media/publications/138907-ID-pelaksanaan-pendidikan-madrasah>
- Istighfarain, “Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Program Wajib Madrasah Diniyah Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep”, Public Corner, Vol. 12, No. 2, (Desember 2017), 26-36.
- Kinerja *Pengelolaan Program Wajib Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep*. Public Corner, vol. 12, No. 2 2017. [ejournalwiraraja.com](http://ejournalwiraraja.com)
- Kompri. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Kuswandi, Iwan, dkk. “Respon Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Peraturan Bupati Tentang Wajib Madrasah Diniyah”, *Autentik: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 14, No.1 (Januari 2020). <https://autentik.stkipgrisumenep.ac.id/index.phpautentik/>
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Perda Kabupaten Sumenep, Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.
- Rachman, Fathor-Ach. Maimun. “Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Sebagai Pusat Pengetahuan Agama Masyarakat Pedesaan (Studi Tentang Peran MDT di Desa Gapura Timur Gapura Sumenep)”. *Jurnal ‘Anil Islam*, Vol. 9. Nomor. 1 (2016). [jurnal.instika.ac.id](http://jurnal.instika.ac.id)
- Rahem, Zaitur, *Jejak Intelektual Pendidikan Islam*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2019.
- Suhaidi, Mohamad. “Implementasi Pendidikan Berbasis Nilai Pesantren di Sekolah Umum (Analisis Terhadap Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di SMPN 2 Sumenep dalam Membentuk Siswa Berkarakter Religius)”. *Jurnal Pelopor Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, (September 2018). [pelopor.stkipgrisumenep.ac.id](http://pelopor.stkipgrisumenep.ac.id)
- Suhaidi, Mohammad. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Wisata Religi Studi Model Belajar Langsung Ilmu Agama Ala Siswa Zaman Now*. Sumenep: CV Abidah Mahran, 2018.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015.